



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-07 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 24 Mei 2025, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka, dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : /FPG/DPRD/V/2025 Tanggal 29 Mei 2025 Perihal Usulan Nama-Nama Anggota Pansus dari Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Banten;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 08/F-Gerindra/DPRD/VI/2025 dan Nomor : 09/F-Gerindra/DPRD/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 004/F.PDIP/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 perihal Usulan Nama-Nama Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 031/FPKS/DPRD-B/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 09/FPD/DPRD-BTN/VI/2025 dan Nomor: 10/FPD/DPRD-BTN/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025 Hal Usulan Nama - Nama Pansus;
 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 14/FKB-DPRD/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Partai NasDem Nomor : 14/F.NasDem/DPRD-Banten/VI/2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus;
 8. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 008/F.PAN.DPRD/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 9. Surat dari Fraksi PPP-PSI Nomor : 01/FPPP-PSI/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 2. Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka;
 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
 3. Melaporkan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
 4. Melaporkan hasil akhir pembahasan dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka, telah dilakukan Persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM

Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-07 Tahun 2025
Tanggal : 3 Juni 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur

PANITIA KHUSUS II PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	UNSUR
1.	H. FAHMI HAKIM, S.E	PIMPINAN DPRD
2.	YUDI BUDI WIBOWO	PIMPINAN DPRD
3.	BARHUM HS, S.IP., M.IP	PIMPINAN DPRD
4.	H. TEGUH ISTA'AL, S.Kom	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	ANANDA TRIANH SALICHAN, S.H	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	Hj. DESY YUSANDI, S.E	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	MUHAMMAD NIZAR	FRAKSI PARTAI GERINDRA
8.	TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	H. AGUS SUPRIYATNA, M.H., M.Si	FRAKSI PARTAI GERINDRA
10.	MUHLIS, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
11.	Hj. IDA ROSIDA LUTFI, S.E., M.Si	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
12.	ERI SUHAERI, S.E., M.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
13.	H. TENGKU IWAN J, S.T	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	H. GEMBONG R. SUMEDI, M.M	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	Drs. H. IIP MAKMUR	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16.	ASEP HIDAYAT	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	H. MUNAWAR HUDA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
18.	M. NUR KHOLIS, S.Th.I	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
19.	H. UMAR BIN BARMAWI, S.T., M.M	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
20.	H. WAWAN SUHADA, S.E., M.M	FRAKSI PARTAI NASDEM
21.	AGUS MAULANA, S.Ag	FRAKSI PARTAI NASDEM
22.	Ir. H. TUBAGUS LUAY SOFHANI	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
23.	MUSA WELIANSYAH	FRAKSI PPP - PSI

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM

Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-07 Tahun 2025
Tanggal : 3 Juni 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur

PANITIA KHUSUS III PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TERBUKA

NO	NAMA	UNSUR
1.	H. FAHMI HAKIM, S.E	PIMPINAN DPRD
2.	Dr. H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak	PIMPINAN DPRD
3.	EKO SUSILO, S.E., M.Si	PIMPINAN DPRD
4.	Drs. H. SYIHABUDDIN HASYIM, S.H., M.E., M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	WAHYU NUGRAHA, S.Pd	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	DR. Hj. RATU AMALIA HAYANI	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	ENCOP SOPIA, S.Ag., M.A	FRAKSI PARTAI GERINDRA
8.	ADE HIDAYAT, S.Kom., M.A.B	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	DEDI HARYADI, S.E	FRAKSI PARTAI GERINDRA
10.	IWAN RAHAYU	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
11.	UBAEDILLAH	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
12.	SUGIANTO, S.IP	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
13.	H. MANSUR, S.P., M.M	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	RISPANEL ARYA, S.T., M.M	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	H. ASNIN SYAFIUDDIN, Lc., M.A	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16.	TAUFIK ARAHMAN, S.H	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	MAHPUDIN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
18.	Dr. MOCH. ALY TAUFIQ, M.Si	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
19.	LUKMAN NULHAKIM, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
20.	RIKA KARTIKASARI, M.Psi (Psikolog)	FRAKSI PARTAI NASDEM
21.	SAVIRA ALIA MUKTAMARA, S.H., M.Kn	FRAKSI PARTAI NASDEM
22.	H. DEDE ROHANA PUTRA, S.E., M.Si	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
23.	M. MAMDUH, S.H., M.H	FRAKSI PPP - PSI

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM